

Memahami PANCASILA

Penulis

Fais Yonas Bo'a Sri Handayani RW

Desain Cover

Wisnu

Cetakan I, Februari 2019

Penerbit

PUSTAKA PELAJAR

Celeban Timur UH III/546 Yogyakarta 55167 Telp. (0274) 381542 Fax. (0274) 383083

E-mail: pustakapelajar@yahoo.com Website: pustakapelajar.co.id

ISBN: 978-602-229-975-2

KATA PENGANTAR

Tergerusnya keberadaan Pancasila dalam tatanan penghayatan dan pengamalannya dewasa ini, disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang Pancasila. Hal demikian, sangat terasa dengan mencermati realitas hidup bernegara yang penuh dengan sikap-sikap amoral, deskriminasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat), hingga primordialisme. Sikap-sikap seperti ini tergambar jelas pada setiap interaksi sosial dalam keseharian hidup berbangsa baik yang sifatnya interaksi langsung maupun tidak langsung seperti melalui jagat maya (medsos). Buku ini ditulis bertujuan untuk memberi pemahaman yang komprehensif dan konkret tentang Pancasila dalam keutuhannya. Terutama, agar dapat menguatkan cara pikir dan cara tindak kita yang sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penuh harapan pula dari kami agar buku ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi mahasiswa khususnya untuk memperdalam Pancasila secara komprehensif dan konkret dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terutama pula, salah satu penulis buku ini merupakan pengajar aktif mata kuliah Pendidikan Pancasila di beberapa fakultas di Universitas Janabadra Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, kami tak lupa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala perlindungan dan bimbingannya dalam proses penyelesaian naskah ini. Tak lupa pula, kami menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada orang tua, suami, anak dan rekan-rekan semuanya yang selalu mendukung setiap langkah kami khususnya dalam berkarya. Terima kasih pula atas segala dukungan dan doa dari keluarga, kerabat dan teman-teman sehingga goresan pemikiran ini menjadi sebuah karya. Pada akhirnya, kami menyadari tidak ada kesempurnaan dalam setiap karya manusia. Untuk itu, dengan hati dan pikiran terbuka kami menerima segala kritikan dan masukan yang bersifat konstruktif dari semua pihak agar buku ini dapat selalu disempurnakan.

Yogyakarta Selamat memahami,

Daftar Isi

Kata Pengantar •v Daftar Isi •vii

BAB I Pendahuluan •1

Latar Belakang Masalah •1

Masalah, Ruang Lingkup dan Pendekatan •5

Pentingnya Pendidikan Pancasila •6

Sistematika Isi Buku •10

BAB II Pancasila Dalam Sejarah •13

Dialektika Rumusan Pancasila •13

Perubahan Fundamen Pancasila •16

Perubahan Final Pancasila •18

Tentang Pancasila Soekarno •19

Historisitas Istilah Pancasila •23

Soal Otentisitas Konsepsi Pancasila •27

BAB III Sila-Sila Pancasila •33

Pembahasan Sila-Sila Pancasila •33

Ketuhanan Yang Maha Esa •34

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab •40

Persatuan Indonesia •46

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan

•52

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia •61

Keutuhan Sila-sila Pancasila •67

BAB IV Fungsi Dan Kedudukan Pancasila •75

Pancasila Sebagai Dasar Negara •79

Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia •84

Pancasila Sebagai Ideologi •87

Pancasila Sebagai Cita Hukum (*Rechtsidee*)/Sumber Segala Sumber Hukum •93

Pancasila Sebagai Konsensus Final. •99

BAB V Eksistensi Pancasila •105

Terkait Eksistensi Pancasila •106

Rezim Orde Lama •106

Rezim Orde Baru •110

Rezim Reformasi-Sekarang •113

Pancasila dan Kekuasaan •118

Eksistensi Pancasila Rezim Orde Baru dan Setelah Reformasi •126

Membangun Kembali Eksistensi Pancasila •130

BAB VI Mengukuhkan Pancasila •137

Tentang Mengukuhkan Pancasila •137

Pengetahuan Pancasila •138

Kesadaran Pancasila •144

Kepribadian Pancasila •149

Hubungan Pengetahuan, Kesadaran dan Kepribadian Pancasila •153

Moral dan Etika Pancasila •155 **Sebuah Catatan (Milenial dan Pancasila) •159 BAB VII**
Penutup •165

Kesimpulan •165

Saran •166 Daftar Pustaka •167

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila mengandung lima sila atau dasar yaitu Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan (musyawarah mufakat) dan keadilan sosial. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh atau *mono pluralis*. Hal demikian berarti kelima sila dalam Pancasila harus selalu dimaknai dan dilaksanakan secara utuh. Misalkan di dalam melaksanakan sila kemanusiaan maka kemanusiaan yang didasari dan dijiwai sila Ketuhanan dan menjiwai sila persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Atas dasar saling keterkaitan tersebut, hubungan sila-sila dalam Pancasila bersifat hirarkis dan piramidal karena setiap sila saling menjiwai dan dijiwai. Sifat hubungan Pancasila yang demikian itu, sekaligus menegaskan bahwa Pancasila harus dipahami dan dilaksanakan secara utuh.

Di dalam perkembangannya, Pancasila diberikan fungsi dan kedudukan istimewa yaitu sebagai dasar negara, falsafah bangsa, ideologi negara, sumber tertib hukum dan sebagai konsensus final. Namun demikian, dalam pelaksanaannya segenap fungsi dan kedudukan Pancasila tidak pernah lengkap dilaksanakan. Di masa rezim Soekarno dengan demokrasi terpimpin ciptaannya, tidak mampu melaksanakan Pancasila secara lengkap menurut fungsi dan kedudukannya. Pada rezim Orde Lama tersebut, Pancasila memang menjadi “daya tawar” yang tinggi dari bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, di tengah menguatnya pemikiran dan ideologi mapan di negara-negara maju, Indonesia yang baru berdiri sudah mampu menciptakan ideologi yang benar-benar asli Indonesia. Namun demikian, tidak boleh dinafikan bahwa Soekarno belum mampu membawa Pancasila tersebut ke dalam tatanan praksis keseharian hidup bernegara.

Ketidakmampuan Soekarno tersebut kemudian diperparah oleh situasi dan kondisi negara yang belum mencapai stabilitas politik baik karena faktor dari luar maupun dari dalam negeri. Setelah Soekarno melepaskan kekuasaannya, naiklah sosok Soeharto yang dengan penuh harapan mampu mengamalkan Pancasila secara sungguh-sungguh dalam hidup bernegara.¹ Soeharto pun menjawab harapan tersebut dengan menjalankan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun, di dalam praktiknya rupa-rupanya Pancasila yang dijalankan

¹ Kekuasaan Soekarno dicabut oleh MPR melalui Ketetapan MPRS-RI Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno. Kemudian kekuasaan pemerintah negara diemban oleh Soeharto melalui Ketetapan MPRS-Nomor XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengembalian Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 sebagai Presiden Republik Indonesia. Sekadar informasi, Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 adalah tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia. Dengan demikian, apabila diteliti maka Soeharto secara konstitusional sebagai Presiden pada tahun 1968 tetapi secara *de facto* sejak 1966 melalui Supersemar. Dan hitungan masa kekuasaan Soeharto yang 32 tahun tersebut terhitung sejak 1966, artinya dihitung secara *de facto* bukan secara konstitusional.

secara murni tersebut hanya demi kepentingan kelanggengan kekuasaan Soeharto belaka. Tidak heran wajah Pancasila yang humanis dan demokratis berubah menjadi “kejam dan brutal”.

Tidak hanya sampai pada pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen, Soeharto bahkan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal yang mengakibatkan segala aliran selain Pancasila dibekukan termasuk aliran dengan basis perjuangan agama. Padahal, aliran-aliran agama diakui oleh Pancasila terutama pula nafas sila Ketuhanan tidak lain adalah

aliran-aliran agama dan kepercayaan. Mengamati kenyataan seperti ini, rasa-rasanya layak untuk mengatakan bahwa Soeharto sebenarnya memulai destruksi Pancasila dengan melaksanakan fungsi dan kedudukan Pancasila secara parsial.

Pancasila yang dilaksanakan secara murni dan konsekuen disandingkan dengan otoriterisme menyebabkan gejolak ketidakpuasan rakyat. Gejolak ketidakpuasan itu pun mencapai titik puncaknya pada 1998 dengan reformasi. Keberhasilan reformasi kemudian mengubah secara radikal sistem ketatanegaraan Indonesia dari yang sebelumnya kekuasaan dipangku oleh satu tangan menjadi tersebar, dari sebelumnya otoriter menjadi demokratis. Dengan demikian, gerak ketatanegaraan semakin baik sebagaimana menurut kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan zaman. Namun, dibalik keberhasilan tersebut juga tersimpan persoalan yang tidak boleh disepelekan yaitu “melempemnya” Pancasila dalam keseharian hidup bernegara.

Sejak reformasi hingga sekarang ini, “gema” Pancasila seakan redup ditangkal perkembangan zaman. Udara kebebasan yang telah diperoleh melalui reformasi, berhembus dengan hebatnya hingga meruntuhkan tembok-tembok fundamen negara sebagaimana menurut Pancasila. Akibatnya, eksistensi Pancasila menjadi lemah bahkan semakin tergerus. Melempemnya Pancasila, jamak terjadi dalam realitas keseharian hidup bermasyarakat dan berbangsa kita khususnya dalam interaksi sosial yang semakin kental dengan sikap-sikap amoral, deskriminasi SARA hingga primordialisme sempit. Kenyataan seperti ini, mudah sekaliditemukan dalam interaksi langsung maupun tidak langsung misalkan melalui medsos. Selain itu, kemungkinan besar disebabkan oleh resistansi terhadap rezim Soeharto yang selama berpuluh-puluh tahun berkuasa dengan menjadikan Pancasila sebagai komoditas politik. Akan tetapi, jika secara jujur melihat, tergerusnya Pancasila dewasa ini berada diantara pengaruh resistensi dengan dendam sejarah.² Tidak heran sejak reformasi hingga sekarang ini, Pancasila hanya dilaksanakan sebagai sesuatu yang bersifat normatif-semantik.

Maka dari itu, sikap-sikap amoral, deskriminasi SARA, primordialisme sempit hingga sikap resistensi dan dendam sejarah tidak boleh terus dipelihara karena sangat merugikan

2. Resistansi di sini diartikan dalam konotasi negatif yaitu merupakan sikap antipati terhadap sesuatu atau seseorang, misalkan dahulu Pancasila dijadikan ideologi tunggal sehingga berwujud “kejam” yang mengakibatkan Pancasila dibenci. Maka sekarang ini timbul paradigma umum bahwa jika Pancasila ditegakkan maka akan berwujud “kejam” pula. Sedangkan dendam sejarah dimaksudkan sebagai sikap yang tidak mampu berdamai dengan sejarah atau masa lalu, misalkan Soeharto dahulu menjalankan kekuasaan otoriter maka setelah Soeharto turun sekalipun selalu menunjukkan sikap-sikap benci terhadap masa lalu. Adanya resistensi dan dendam sejarah disebabkan oleh adanya rasa trauma berlebihan terhadap masa lalu. Hemat kami, resistensi dan dendam sejarah adalah sikap-sikap yang kerap “menyandera” bangsa Indonesia hingga saat ini, sehingga daya kreatif, inovatif dan visioner untuk kepentingan bangsa sulit untuk berkembang.

eksistensi Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Maka dari itu, eksistensi Pancasila dalam keutuhannya harus terus dihayati dan diamalkan. Dengan demikian, pemahaman tentang Pancasila tentu sudah menjadi syarat dasar. Apalagi, upaya-upaya memahami Pancasila setelah reformasi hingga sekarang ini, rasa-rasanya tidak begitu giat dilakukan, meskipun di lain sisi rezim Jokowi sedang berupaya dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Badan ini sekiranya mampu bekerja dengan baik agar Pancasila dapat kembali ditegakkan dalam keseharian hidup bernegara.

Masalah, Ruang Lingkup dan Pendekatan

Berdasarkan latar belakang masalah di muka, maka dapat ditemukan tiga permasalahan dan ruang lingkup pembahasannya yaitu:

1. Bagaimana Pancasila dalam keutuhannya? Lingkup pembahasan terhadap masalah ini adalah sejarah Pancasila dan sila-sila Pancasila.
2. Bagaimana eksistensi Pancasila? Lingkup pembahasan terhadap masalah ini adalah fungsi dan kedudukan Pancasila dan eksistensi Pancasila sepanjang masa
3. Apa upaya untuk mengukuhkan Pancasila? Lingkup pembahasan terhadap masalah ini adalah upaya mengukuhkan Pancasila.

Di dalam penulisan buku ini, hanya digunakan satu pendekatan yaitu pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah atau historis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah dari Pancasila untuk memahami pemikiran yang melandasi keberadaan Pancasila dalam keutuhannya serta mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu. Peter M. Marzuki menjelaskan tujuan pendekatan sejarah adalah agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi sesuatu yang diteliti. Dengandemikian, tujuan pendekatan sejarah dalam penulisan buku ini adalah agar penulis memahami lebih dalam filosofi dan dinamika keberadaan Pancasila.³ Pendekatan sejarah di sini tidak boleh dianggap hanya tentang sejarah dari Pancasila, tetapi juga tentang perkembangan, eksistensi dan perbandingan antara setiap waktu dan zaman.

Pentingnya Pendidikan Pancasila

Keberadaan Pancasila sangat menentukan gerak dan dinamika berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus senantiasa dipahami dan dilaksanakan dalam setiap tatanan atau aspek penggerak negara. Khazanah pendidikan harus diakui sebagai salah satu penggerak negara, sehingga sudah barang tentu sangat membutuhkan pemahaman dan pelaksanaan Pancasila. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi memiliki satu mata kuliah wajib dengan nama pendidikan Pancasila. Roeslan Abdulgani menegaskan bahwa urgensi pendidikan Pancasila, yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok (*leitmotive*) dan bintang penunjuk jalan (*leitstar*).⁴ Urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang tongkat estafet

3. Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi cet. Ke 8*, Jakarta: Ken- cana Prenada Media Group, 2005, hlm. 166

4. Roeslan Abdulgani, *Pengembangan Pancasila Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1979, hlm. 14

kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif.

Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Dengan demikian, mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Hal ini berarti mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan

menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge*, *attitude*, dan *skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, serta dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).⁵

Dapat dipahami bahwa pendidikan Pancasila sangat penting diselenggarakan di perguruan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Dikti No 38/DIKTI/Kep/2002, Pasal 3, Ayat (2) bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, serta berpandangan

5. RISTEKDIKTI, *Pendidikan Pancasila: untuk Perguruan Tinggi, Cetakan 1*, Jakarta:

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016, hlm. 20

luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa:

1. Agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya;
2. Agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya;
3. Agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni
4. Agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional, mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat agar:⁶

- a. Menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
- c. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani;
- d. Mampu mengikuti perkembangan IPTEK dan seni; serta
- e. Mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan kesejahteraan bagi bangsanya.

Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan Pendidikan

Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk:⁷

1. Memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara

6. *Ibid.*, hlm. 25

7 *Ibid.*, hlm. 25-26

dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

4. Membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila, untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia (Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2013: viii).

Ditetapkannya pendidikan Pancasila dalam perguruan tinggi dewasa ini sangatlah diutamakan karena di zaman yang penuh keterbukaan seperti sekarang ini memberi potensi bagi bertumbuh dan berkembangnya ideologi atau pemikiran-pemikiran yang ekstrimis dan radikal. Jajak pendapat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT tahun 2017 memperlihatkan 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik pada paham radikal dan Riau termasuk dalam 15 daerah yang dikaji.

Beberapa provinsi lainnya adalah Jawa Barat, Lampung, Banten, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Tengah. Sementara itu, pada bulan Agustus 2017, Wahid Institute menyebutkan 11 juta orang bersedia melakukan tindakan radikal, 0,4% penduduk Indonesia pernah bertindak radikal dan 7,7% mau bertindak radikal jika memungkinkan.⁸

Meskipun jejak pendapat yang dilakukan masih perlu verifikasi yang jelas, tetapi penemuan seperti ini menunjukkan adanya indikasi melemahnya pemahaman dan pengamalan Pancasila di kampus yang menyebabkan membelotnya beberapa oknum *civitas akademis* ke paham-paham ekstrimis dan radikal. Tentu saja hal ini membutuhkan upaya ekstra dari kampus dalam membina, mengamalkan dan menegakkan Pancasila dalam keseharian hidup di kampus. Dengan demikian, pendidikan Pancasila haruslah senantiasa dapat menumbuhkan suburkan pemahaman dan pengamalan Pancasila di kampus.

Sistematika Isi Buku

Buku ini membahas dan mengkaji secara komplet tentang Pancasila yang terdiri dari tujuh bab. Bab I berisi tentang Pendahuluan yang mengetengahkan Latar belakang masalah, rumusan dan ruang lingkup dan pentingnya pendidikan Pancasila. Bab II tentang Pancasila

dalam sejarah yang membahas: dialektika rumusan Pancasila; historisitas istilah Pancasila; dan otentisitas atau keaslian konsepsi sila-sila. Bab III tentang sila-sila Pancasila yang membahas: sila-

8 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44357353> “Temuan BNPT tentang paparan radikalisme di sejumlah universitas dipertanyakan”

sila Pancasila yaitu sila Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah mufakat dan keadilan sosial dan keutuhan sila-sila Pancasila. Bab IV tentang fungsi dan kedudukan Pancasila yang membahas: Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai cita hukum dan Pancasila sebagai konsensus final.

Bab V tentang eksistensi Pancasila yang membahas mengenai eksistensi Pancasila dalam setiap masa yang tergambarkan dalam setiap rezim yang ada yaitu dalam rezim Orde Lama, Orde Baru dan Rezim reformasi hingga sekarang ini. Bab VI tentang upaya mengukuhkan Pancasila yang membahas terkait pengetahuan Pancasila, kesadaran Pancasila dan kepribadian Pancasila serta terkait menguatkan moral dan etika Pancasila. Bab VII Penutup berisi kesimpulan dan saran. Ketujuh pokok pembahasan ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif dan lebih konkret-praksis tentang Pancasila. Pada penghujung buku ini, kami membuat “sebuah catatan (milenial dan Pancasila)” yang bertujuan untuk mengamalkan Pancasila dalam peradaban internet. Selebihnya, kami ingin menegaskan bahwa pemikiran dasar dari penulisan buku ini adalah memahami untuk melakukan. Jadi, dengan adanya pemahaman yang komprehensif terhadap Pancasila maka sudah tentu pemahaman tersebut akan menjadi tuntutan dan tanggungjawab bagi segala komponen bangsa dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.